

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak peringkat ke-4 di dunia, Indonesia berada dibawah Tiongkok (China), India, dan Amerika Serikat (USA). Indonesia juga memiliki pulau yang sangat banyak dan luas sehingga masyarakat pun juga tinggal di berbagai daerah. Banyaknya penduduk dan luasnya daratan di Indonesia ini mengakibatkan pemerintah susah menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, sehingga banyak masyarakat yang kurang mampu untuk mencukupi segala kebutuhan. Hal itu menyebabkan masyarakat daerah pelosok banyak terjadi masalah ketimpangan sosial dan kemiskinan karena kurangnya perhatian dari pemerintah dan hal itu juga mengakibatkan masyarakat daerah pelosok tertinggal jauh dari masyarakat di daerah kota. Saat ini pemerintah juga masih berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan berbagai kekurangan yang ada di wilayah pelosok seluruh Indonesia. Itu pun juga masih lumayan sulit karena memerlukan biaya yang banyak karena terkendala kondisi geografi yang sulit dijangkau.

Kemiskinan itu sendiri merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat di seluruh dunia. Negara manapun pasti memiliki penduduk miskin, yang membedakan yaitu tata cara kelola pemerintah untuk meminimalisir tingkat penduduk miskin yang ada di suatu negara. Kemiskinan merupakan suatu kondisi kekurangan yang dialami individu yang

berdampak langsung terhadap kesejahteraan hidupnya (Pradipta & Dewi, 2020). Kemiskinan sebagai ancaman telah menjadi salah satu masalah terbesar yang ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Menurut Mufasir Al Qur'an Muhammad Quraish Shihab, memandang kata "miskin" berarti diam atau tidak bergerak, artinya salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap diam, keengganan untuk berusaha atau bergerak dan mencoba segala hal agar menjadi lebih baik. Tidak ingin berusaha adalah penyebab penganiayaan kepada diri sendiri (Rinaldi et al., 2022). Hal tersebut bertentangan dalam ajaran agam islam sebagaimana dijelaskan pada Al – Qur'an surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya : ”Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Pada tahun 1990, World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimal. Kemudian pada tahun tahun 2004, World Bank menguraikan kembali definisi kemiskinan secara lebih detail yaitu “Kemiskinan adalah kelaparan. Kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Kemiskinan adalah sakit dan tidak mampu untuk periksa ke dokter. Kemiskinan adalah tidak mempunyai akses ke sekolah dan tidak mengetahui bagaimana caranya membaca. Kemiskinan adalah tidak mempunyai pekerjaan dan khawatir akan kehidupan di masa yang akan datang. Kemiskinan adalah kehilangan anak karena penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak bersih. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, ketiadaan keterwakilan dan kebebasan” (Soleh et al., 2014).

Tingkat kemiskinan di Negara Indonesia saat ini menempati peringkat 88 untuk versi World Bank dan menempati posisi 92 untuk versi IMF pada tahun 2020. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak sekali mayoritas masyarakat miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah dalam segala bentuk subsidi. Hal ini perlu dilakukan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari berbagai daerah. Di sisi lain pemerintah juga perlu membangun akses infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, dan lain-lain. Hal itu berguna mempermudah jalur akses wilayah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan fasilitas fasilitas lain yang layak (Nugroho, 2016). Saat ini, penanggulangan kemiskinan telah menjadi tujuan utama pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia. Pengurangan kemiskinan menjadi salah satu

agenda utama *The Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah disepakati oleh 189 pemimpin negara pada September 2015. Para pemimpin negara dunia (termasuk Indonesia) telah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD). Tujuan pertama SGD adalah untuk memastikan bahwa setiap orang di setiap tempat di dunia bebas dari kemiskinan (Taruno, 2019). Kemiskinan itu sendiri masih melanda penduduk di berbagai kota ataupun daerah di Indonesia seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 dibawah ini :

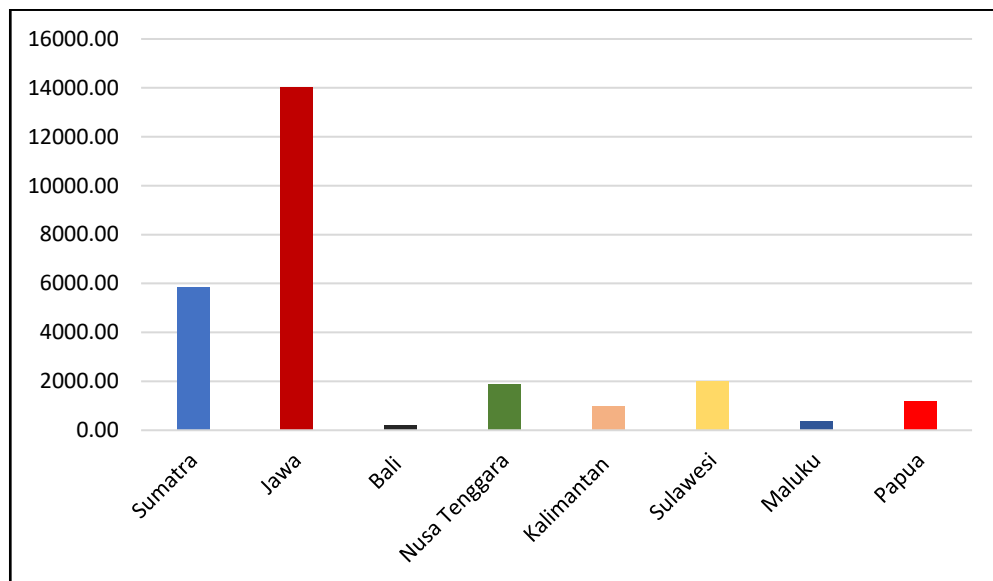
Tabel 1.1
Rasio Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021

Jumlah Penduduk di Indonesia				
Ratio Jumlah Kemiskinan	Kemiskinan			Total Penduduk
	Perkotaan	Pedesaan	Total	
Persen	7,60	12,53	9,71	
Ribu jiwa	11.859,34	14.644,30	26.503,65	273.523,61

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa total jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 273.523,61 ribu jiwa dan dari total jumlah penduduk tersebut 26.503,65 diantaranya adalah penduduk yang kurang mampu atau miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk miskin di Indonesia di bagi menjadi yaitu penduduk miskin di daerah perkotaan dan Pedesaan, dimana penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 11,859,34 ribu jiwa dan di daerah pedesaan sebanyak 14.644,30 ribu jiwa. Jika tunjukkan dalam bentuk persentase maka total penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,71% diantaranya terdiri dari 7,60% untuk penduduk perkotaan dan 12,53% untuk

wilayah pedesaan. Hal itu menunjukkan adanya berbagai faktor pengaruh penduduk miskin yang berbeda untuk di setiap daerah yaitu Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Upah Minimum Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah Indonesia tahun 2021 seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.1.



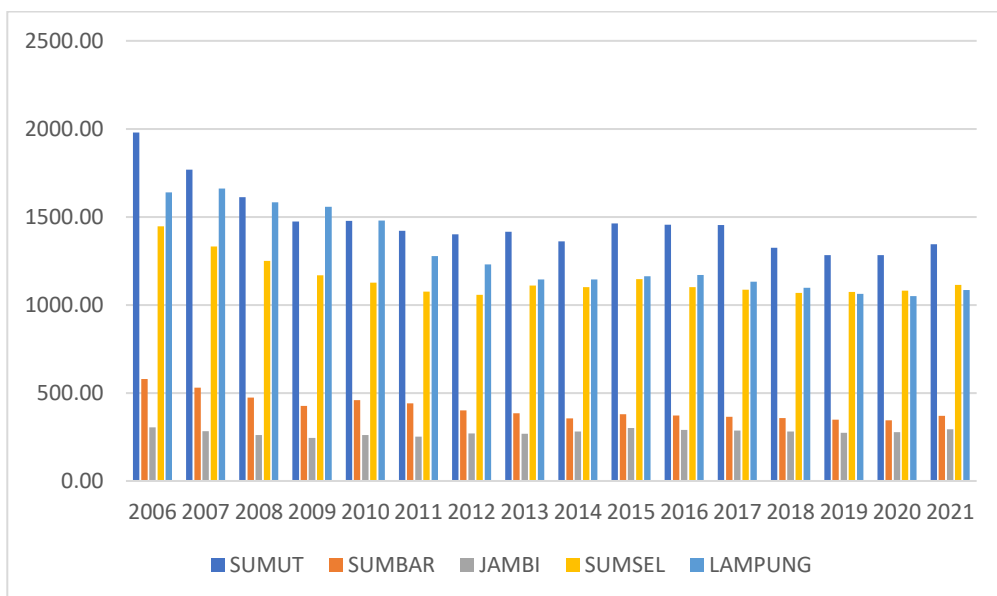
Sumber :Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Setiap Pulau di Wilayah Indonesia Tahun 2021
(ribu jiwa)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia tiap pulau diantaranya Pulau Sumatra berjumlah 5.862,65 ribu jiwa, Pulau Jawa berjumlah 14.023,53 ribu jiwa, Pulau Bali berjumlah 211,46 ribu jiwa, Pulau Nusa Tenggara berjumlah 1.881,58 ribu jiwa, Pulau Kalimantan berjumlah 975,41 ribu jiwa, Pulau Sulawesi berjumlah 2.007,07 ribu jiwa, Pulau Maluku berjumlah 376,15 ribu jiwa, dan Pulau Papua berjumlah 1.165,78 ribu jiwa. Pulau Bali memiliki jumlah penduduk miskin yang paling sedikit dengan 211,46 ribu jiwa dan Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk

miskin paling banyak dengan 14.023,53 ribu jiwa, sedangkan Pulau Sumatra urutan kedua terbanyak dengan 5.862,65 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin Pulau Sumatra tersebut terdiri dari 850,26 ribu jiwa dari Aceh, 1.273,07 ribu jiwa dari Sumatra Utara, 339,93 ribu jiwa dari Sumatra Barat, 496,66 ribu jiwa dari Riau, 279,86 ribu jiwa dari Jambi, 1.116,61 ribu jiwa dari Sumatra Selatan, 291,79 ribu jiwa dari Bengkulu, 1.007,02 ribu jiwa dari Bengkulu, 69,70 ribu jiwa dari Kep. Bangka Belitung, dan 137,75 ribu jiwa dari Kep. Riau. Hal itu menunjukkan besarnya jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatra yang masih banyak menjadi permasalahan utama dalam mengurangi rasio kemiskinan.

Kemiskinan itu terjadi baik di dalam pedesaan maupun perkotaan yang diakibatkan oleh berbagai faktor pengaruh yang beragam seperti halnya kurangnya lapangan pekerjaan maupun kurangnya pendidikan yang untuk masyarakat. Kemiskinan tiap tahun akan terus berkurang seiring dengan program pemerintah yang akan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia ke seluruh pelosok negeri, hal itu akan terjadi karena pemerintah akan berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mengurangi kemiskinan yang ada seperti halnya yang terjadi dengan pemerintah Pulau Sumatra khususnya pada 4 provinsi berikut yaitu Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan Jambi. Berikut adalah rasio persentase jumlah penduduk miskin di 5 Provinsi tersebut dari tahun 2006-2021 seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.2.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung Tahun 2006-2021

Dari Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin berupa persentase dari total penduduk miskin di 5 provinsi tersebut masih tergolong tinggi-sedang karena pada dasarnya angka tingkat kemiskinan di Indonesia relatif menurun tiap tahunnya. Akan tetapi berdasarkan gambar diatas maka tingkat Kemiskinan tersebut mengalami sedikit peningkatan diakibatkan karena Pandemi Covid-19. Hal itu berdampak dengan adanya kenaikan pada tingkat kemiskinan yang terjadi di daerah Sumatra Utara dari yang mulanya tahun 2006 di angka 1979,70 ribu jiwa turun sampai 1283,29 ribu jiwa pada tahun 2020 naik menjadi 1343,86 ribu jiwa pada tahun 2021, untuk daerah Sumatra Barat dari mulanya 2006 di angka 578,70 ribu jiwa turun sampai 344,23 ribu jiwa pada tahun 2020 dan naik menjadi 370,67 ribu jiwa pada tahun 2021, untuk daerah Sumatra Selatan tahun 2006 dari yang awalnya 1446,90 ribu jiwa turun menjadi 1081,59 ribu jiwa pada tahun 2020

dan naik menjadi 1113,76 ribu jiwa pada tahun 2021, untuk daerah Jambi dari awalnya tahun 2006 di angka 304,60 ribu jiwa turun sampai 277,80 ribu jiwa pada tahun 2020 dan naik menjadi 293,86 ribu jiwa pada tahun 2021, dan untuk daerah Lampung dari awalnya tahun 2006 di angka 1638,80 ribu jiwa turun sampai 1049,32 ribu jiwa pada tahun 2020 dan naik menjadi 1083,93 ribu jiwa pada tahun 2021. Penurunan angka tingkat kemiskinan ini sudah tergolong cukup baik karena persentase kemiskinan tiap provinsi terus menurun. Dengan rendahnya tingkat kemiskinan yang ada ini menandakan bahwa rata rata penduduk di 5 provinsi tersebut memiliki ekonomi yang cukup-tinggi artinya rata-rata masyarakat telah dapat mencukupi segala kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut di tunjukkan dengan data faktor penyebab kemiskinan yaitu IPM, investasi upah minimum, dan pengeluaran pemerintah.

Tabel 1.2
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 5 Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2017-2021 (Dalam persen)

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia				
	Sumatra Utara	Sumatra Barat	Jambi	Sumatra Selatan	Lampung
2017	73.29	73.26	72.14	72.05	70.45
2018	73.80	73.44	72.45	72.61	70.93
2019	74.19	73.78	72.74	72.95	71.42
2020	74.65	74.28	73.30	73.42	71.94
2021	75.13	74.70	73.78	73.99	72.45

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tiap provinsi mengalami fluktuasi, akan tetapi tetapi fluktuasi tersebut mengarah pada kenaikan terus menerus tiap tahunnya yang artinya kenaikan persentase IPM akan

mengurangi jumlah kemiskinan di suatu wilayah. Hal ini selaras dengan penelitian (Sukmagara, 2011) yaitu IPM yang rendah akan menyebabkan produktivitas tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah menimbulkan pendapatan yang rendah juga sehingga meningkatkan potensi banyaknya penduduk miskin. Hal itu merujuk bahwa kenaikan IPM akan berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan tenaga kerja sehingga berpengaruh langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

Tabel 1.3

Data Investasi 5 Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2017-2021 (Milyar rupiah)

Tahun	Investasi				
	Sumatra Utara	Sumatra Barat	Jambi	Sumatra Selatan	Lampung
2017	4,864.20	1,517.00	3,884.40	8,200.20	6,031.80
2018	8,371.80	2,309.40	3,006.60	9,519.80	5,809.20
2019	19,749.00	2,559.80	4,437.40	16,921.10	7,014.80
2020	18,189.50	3,026.60	3,511.70	15,824.50	12,314.70
2021	18,484.50	3,106.20	6,204.20	16,266.90	7,120.50

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tiap provinsi mengalami kenaikan investasi yang terjadi pada wilayah tersebut tiap tahunnya. Kenaikan tersebut mengalami perubahan pada berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat salah satunya aspek ekonomi, dimana investasi memberikan modal untuk menambah produktivitas dalam perekonomian. Investasi pada dasarnya yaitu pengeluaran untuk menambah jumlah produksi akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan perekonomian sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Pengeluaran yang dimaksudkan yaitu dengan belanja untuk anggaran dalam memperbaiki suatu

infrastruktur ataupun menambah fasilitas agar dapat digunakan untuk masyarakat luas.

Tabel 1.4
Data Upah Minimum 5 Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2017-2021 (Ribu rupiah)

Tahun	Upah Minimum				
	Sumatra Utara	Sumatra Barat	Jambi	Sumatra Selatan	Lampung
2017	1.961.354	1.949.284	2.063,000	2.388.000	1.908.447
2018	2.132.189	2.119.067	2.243,719	2.595.995	2.074.673
2019	2.303.403	2.289.220	2.423,889	2.804.453	2.241.270
2020	2.499.423	2.484.041	2.630,162	3.043.111	2.432.001
2021	2.499.423	2.484.041	2.630,162	3.043.111	2.432.001

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tiap provinsi mengalami kenaikan upah minimum yang terjadi pada wilayah tersebut tiap tahunnya. Kenaikan upah minimum akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dalam masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Hal itu selaras dengan teori upah minum alami yaitu upah minimum akan mengangkat derajat pendapatan khususnya penduduk miskin. Semakin meningkatnya pendapatan upah minimum akan meningkatkan kesejahteraan.

Tabel 1.5
Data Pengeluaran Pemerintah 5 Provinsi di Pulau Sumatra tahun 2017-2021 (Milyar rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah				
	Sumatra Utara	Sumatra Barat	Jambi	Sumatra Selatan	Lampung
2017	13,112.68	6,245.97	4,342.30	8,612.02	6,807.92
2018	13,544.55	6,800.12	4,534.14	9,182.30	7,633.02
2019	14,060.76	6,822.71	4,869.53	9,953.60	7,807.92
2020	14,180.97	6,954.11	5,244.69	10,645.59	7,481.83
2021	13,956.49	7,364.94	5,244.83	10,831.50	7,652.49

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tiap provinsi mengalami fluktuasi, akan tetapi tetapi fluktuasi tersebut cenderung naik dan stabil untuk tiap tahunnya. Stabilitas kenaikan pengeluaran pemerintah ini berujuk pada kebijakan menstabilkan perekonomian dan distribusi pendapatan. Hal ini selaras dengan teori Rostow yaitu pengeluaran pemerintah digunakan untuk meningkatkan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan di pulau Sumatra sendiri untuk beberapa tahun terakhir selalu mengalami penurunan dan menuju persentase kemiskinan yang rendah untuk kesejahteraan dalam masyarakat. Akan tetapi beda halnya pada tahun 2020-2021 yang menjadi suatu masalah di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan merosotnya ekonomi di seluruh dunia. Akan tetapi untuk tahun 2022 keadaan ekonomi sudah mulai normal kembali. Hal itu merupakan dampak positif dari kebijakan pembangunan daerah di Indonesia khususnya untuk pulau Sumatra dalam hal mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pada umur produktif. Dengan persebaran lapangan pekerjaan yang luas akan meningkatkan tingkat ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kotambunan et al., 2016) tentang Analisis Pengaruh Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara, hasil pada penelitian ini yaitu ipm berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi

Sulawesi Utara. Penelitian yang dilakukan oleh (Lathifah, 2022) tentang Pengaruh IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Laju PDRB Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah, hasil pada penelitian ini yaitu ipm berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Prapdopo & Azizah, 2018) tentang *Determinants of poverty in east Kalimantan Province, Indonesia* memiliki hasil yaitu variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pratama & Utama, 2019) tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, hasil pada penelitian ini yaitu investasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Penelitian yang dilakukan oleh (Paramita & Purbadharmaja, 2015) tentang Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali, hasil pada penelitian ini yaitu investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (SAFITRI & EFFENDI, 2019) tentang Pengaruh Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk dan Investasi terhadap Kemiskinan di Kalimantan Selatan memiliki hasil bahwa investasi memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sumatra Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh (Priseptian et al., 2022) tentang Analisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan, hasil pada penelitian ini

yaitu upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian yang dilakukan oleh (Islami & Anis, 2019) tentang Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, hasil pada penelitian ini yaitu upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Putri, 2021) tentang Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhillah et al., 2021) tentang *Effect of Export, Government Expenditure, and Inflation on Indonesia Poverty*, hasil pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (KHAMILAH, 2019) tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Selatan, hasil pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kemiskinan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramdani, 2017) tentang Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012 memiliki hasil pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas , kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang sangat penting untuk di atasi di Pulau Sumatra. Untuk itu

diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai “Analisis Pengaruh IPM, Investasi, UMK, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin Pada 5 Provinsi di Pulau Sumatra”, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kebijakan bagi tiap kabupaten/ kota dalam usaha mengatasi kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dapat saya rumuskan bahwa :

1. Bagaimana analisis pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di daerah Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung?
2. Bagaimana analisis pengaruh variabel Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di daerah Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung?
3. Bagaimana analisis pengaruh variabel Upah Minimum Kerja (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di daerah Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung?
4. Bagaimana analisis pengaruh variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di daerah Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menghindari kesimpang siuran di dalam penelitian ini, maka penting sekali dirumuskan secara jelas tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang terjadi di Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis pengaruh variabel Investasi terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang terjadi di Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung.
3. Untuk mengetahui analisis pengaruh variabel Upah Minimum Kerja (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang terjadi di Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung.
4. Untuk mengetahui analisis pengaruh variabel Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin yang terjadi di Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah di Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, dan Lampung diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan pedoman dalam mengambil kebijakan – kebijakan dalam pengentasan kemiskinan.

2. Sebagai bahan acuan atau sumber referensi bagi para pembaca yang berminat untuk meneliti masalah yang sama ataupun serupa dalam penelitian selanjutnya.
3. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
4. Untuk penulis sebagai tambahan wawasan dan pengalaman langsung tentang cara melihat korelasi pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, Upah Minimum Kerja, dan Pengeluaran pemerintah terhadap tingkat Kemiskinan dengan metode Data Panel dan pengumpulan data.